

# STATISTIK KETAHANAN SOSIAL PROVINSI PAPUA 2014



<http://papua.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA**  
*Statistics of Papua Province*

# STATISTIK KETAHANAN SOSIAL PROVINSI PAPUA 2014



<http://papua.bps.go.id>

## STATISTIK KETAHANAN SOSIAL PROVINSI PAPUA TAHUN 2014

ISBN :  
No. Publikasi : 94520.1506  
Katalog BPS : 3201021.94  
Ukuran Buku : 15 cm x 20 cm  
Jumlah Halaman : viii + 90 halaman

Naskah :  
Bidang Statistik Sosial  
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Tim Penyusun Naskah:  
Penanggung Jawab Umum: Didik Kesbianto  
Koordinator : Fadjri Amora  
Anggota : Chairil Fadli  
Ika Rusinta  
Mety Irjayanti

Gambar Kulit dan Tata Letak:  
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik  
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Koordinator : Muhammad Ali  
Tata Letak : Ikfina Chairani  
Gambar Kulit : Chairil Fadli

Diterbitkan Oleh:  
©Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya “Publikasi Statistik Ketahanan Sosial Papua 2014” dapat terselesaikan.

Publikasi Statistik Ketahanan Sosial Papua 2014 merupakan hasil kompilasi data primer dan sekunder. Yang dikumpulkan selama periode tahun 2014. Informasi statistik yang disajikan dalam publikasi ini antara lain: politik dan keamanan, lingkungan hidup, kemiskinan dan Indeks Demokrasi Indonesia.

Buku ini diterbitkan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan data bagi para pengguna baik pemerintah, akademisi dan masyarakat, baik dalam perencanaan, penentuan dan evaluasi kebijakan, maupun untuk keperluan penelitian dan analisis data dalam bidang politik, keamanan lingkungan hidup, kemiskinan dan demokrasi.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan publikasi ini.

Disadari bahwa dalam penerbitan publikasi ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan. Untuk itu, saran dan kritik membangun dari para pengguna publikasi ini sangat kami harapkan guna penyempurnaan dimasa mendatang.

Jayapura, Desember 2015  
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Kepala,



Ir. Didik Koesbianto, M.Si

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar gambar.....	viii
<b>BAB I</b> Politik dan Keamanan .....	2
1.1. Politik.....	3
1.1.1. Pemerintah Daerah .....	3
1.1.2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	7
1.2. Keamanan .....	10
<b>BAB II</b> Lingkungan Hidup .....	20
2.1. Konsep dan Defenisi .....	26
2.2. Lingkungan Alam .....	35
2.2.1. Iklim.....	36
2.2.2. Sumber Daya Air.....	39
2.2.3. Sumber Daya Ikan .....	41
2.2.4. Kenekaragaman Hayati.....	42
2.2.5. Bencana Alam .....	45
2.3. Lingkungan Buatan .....	47
2.3.1 Perumahan .....	48
<b>BAB III</b> Kemiskinan.....	54
3.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan.....	55
3.2. Perubahan Garis Kemiskinan.....	56
3.3. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan .....	59
3.4. Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi .....	61
<b>BAB IV</b> Indeks Demokrasi Indonesia .....	64
4.1. Arti Penting dan Manfaat Indeks Demokrasi Indonesia.....	65
4.2. Aspek, variabel dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia.....	68
4.3. Indeks Demokrasi Indonesia 33 Provinsi.....	73
4.4. Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Aspek.....	75
4.5. Perkembangan Indeks variabel IDI .....	77

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah PNS Menurut Unit Kerja dan Tingkat Kepangkatan di Provinsi Papua, Tahun 2014 .....	6
Tabel 1.2.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Periode 2014-2019 .....	8
Tabel 1.3.	Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/ Kota, 2013 .....	12
Tabel 1.4.	Jumlah Polisi Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin, Tahun 2013 .....	13
Tabel 1.5.	Jumlah Tindak Kejahatan yang dilaporkan (Crime Total) Menurut Kabupaten/ Kota, 2011-2013 .....	14
Tabel 1.6.	Jumlah Tindak Kejahatan yang diselesaikan (Crime Cleared) Menurut Kabupaten/ Kota, 2011-2013 .....	15
Tabel 1.7.	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (Crime Clock) Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2013 .....	17
Tabel 1.8.	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan (Crime Rate) di Provinsi Papua, Tahun 2011-2013 .....	18
Tabel 2.1.	Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, Tekanan Udara dan Penyinaran Matahari, Tahun 2014 .....	38
Tabel 2.2.	Kualitas Air Sungai di Ibukota Provinsi yang Digunakan Bahan Baku Air Minum, Tahun 2014 .....	40
Tabel 2.3.	Produksi perikanan Tangkap Menurut Jenis Perairan (Ton), Tahun 2009-2012 .....	42
Tabel 2.4.	Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi Menurut Jenis Konservasi, 2010-2011 .....	44
Tabel 2.5.	Frekuensi Gempa Berdasarkan Kedalaman dan Kekuatan Menurut Pulau, 2013 .....	46
Tabel 2.6.	Jumlah Desa yang Memiliki pemukiman Kumuh Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2014 .....	49

Tabel 2.7.	Jumlah dan Persentase Desa Menurut Keberadaan Keluarga yang Tinggal di Bantaran Sungai dan Bawah Jaringan Listrik Tegangan Tinggi, 2014 .....	50
Tabel 2.8.	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan, Tahun 2011-2014 .....	51
Tabel 3.1.	Persentase Penduduk Miskin menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2006-2015 .....	56
Tabel 3.2.	Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2010-2015 .....	58
Tabel 3.3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) Menurut Daerah, Maret 2010-Maret 2015 .....	59
Tabel 4.1.	Indeks Aspek Pada Provinsi dengan IDI Tertinggi dan Terendah, 2014 .....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana ( <i>Clearance Rate</i> ) Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2013 .....	16
Gambar 2.1.	Suhu Udara Rata-rata (°C) di Provinsi Papua, Tahun 2013-2014.....	36
Gambar 2.2.	Kelembabab Udara Rata-rata (%) di Provinsi Papua, Tahun 2013-2014.....	37
Gambar 2.3.	Rata-rata Kecepatan Angin (Knot) di Provinsi Papua, Tahun 2013-2014.....	37
Gambar 3.1.	Perkembangan Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2006-2015.....	55
Gambar 3.2.	Persentase Garis Kemiskinan Menurut Jenis Komoditi, 2010-2015 .....	58
Gambar 3.3.	Persentase Penduduk Miskin Maret 2015 dan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Periode September 2014 – Maret 2015 menurut Provinsi .....	62
Gambar 4.1.	Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi, 2014 .....	74
Gambar 4.2.	Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Aspek, 2014 .....	76
Gambar 4.3.	Perkembangan Indeks Variable IDI Provinsi Papua, 2013-2014 .....	77



HINGGA TAHUN 2013  
**KEAMANAN** MASIH MENJADI  
**ISU UTAMA**  
DI PROVINSI PAPUA

JUMLAH TINDAK KEJAHATAN YANG DILAPORKAN DAN DISELESAIKAN  
DI PROVINSI PAPUA, 2011-2013

■ DILAPORKAN ■ DISELESAIKAN



**35,71%**

TINDAK KEJAHATAN  
BELUM TERSELESAIKAN  
DI PROVINSI PAPUA

“KASUS KEJAHATAN YANG  
BELUM TERSELESAIKAN  
MASIH TINGGI DI PAPUA”

## **BAB I**

### **Politik dan Keamanan**

Sistem politik Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia sejak jaman kerajaan sampai masa reformasi sekarang. Ketika dibacakan proklamasi kemerdekaan tahun 1945 sejak itulah Indonesia telah memulai sejarah perpolitikannya.

Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah penduduk terbesar keempat didunia setelah Cina, India, dan Amerika serta keanekaragaman suku dan budaya menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan percepatan pembangunan di segala bidang termasuk penerapan sistem perpolitikan yang paling tepat untuk bangsa ini.

Sistem Politik Demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang diterapkan oleh Indonesia pada saat ini, sistem ini mengambil nilai-nilai luhur dari Pancasila sebagai dasar pedoman demokrasi dengan menganut empat prinsip. *Pertama* Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berdasarkan hukum, kedua pemerintah berdasarkan konstitusi, ketiga jaminan kebebasan individu dalam batasan tertentu, keempat pemilu langsung dan multipartai.

Dibutuhkan peran dari semua pihak, baik lembaga pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, PDP, MA, MK, KY dan lembaga lainnya) serta dukungan dari partai politik, organisasi masyarakat, media komunikasi politik, pers, dan seluruh elemen masyarakat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan sistem politik Indonesia agar kebijakan pemerintah sesuai dengan hati nurani rakyat.

## **1.1. Politik**

### **1.1.1. Pemerintah Daerah**

Pemberlakuan Otonomi Daerah membuat berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas Pemerintah Pusat dikelola secara otonom oleh Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan tersebut, kebijakan-kebijakan daerah akan dibuat lebih dekat dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat. Implikasinya, daerah-daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota yang wilayahnya terlalu besar dimekarkan menjadi beberapa daerah untuk efektifitas pemerintahan daerah. Dinamika politik lokal juga ditandai dengan keleluasaan masyarakat memilih pemimpin seperti Gubernur, Bupati/Walikota secara langsung melalui Pilkada.

Indonesia telah menempuh berbagai langkah untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Dari aspek regulasi dimulai dengan beberapa pengesahan Undang-Undang seperti UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara yang berisi pengaturan agar struktur lembaga dapat efektif dan efisien. Demikian juga dengan disahkannya UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, serta UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan bagian dari usaha mempercepat reformasi birokrasi. Dalam itikad yang sama, terdapat 7 Undang-Undang lain yang masih dalam proses

pembahasan; RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Etika Penyelenggara Negara, RUU Sistem Pengawasan Nasional, RUU Akuntabilitas Penyelenggara Negara, RUU Kepegawaian Negara, RUU Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta RUU Badan Layanan Umum.

Usaha untuk meningkatkan kinerja aparatur negara, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN & RB) dengan penyempurnaan dan pengembangan jabatan fungsional, pengembangan sistem penilaian prestasi kerja PNS, serta pengembangan pola karir dalam jabatan struktural (Renstra KEMENPAN & RB 2010-2014:8). Langkah memperbanyak tenaga fungsional dan pengembangan sistem penilaian prestasi kerja dapat membantu membangun budaya organisasi yang lebih sehat. Bukan hanya berdampak internal, budaya organisasi yang sehat juga dapat mendukung kemampuan aparatur negara dan lembaga pemerintah untuk adaptif terhadap tantangan eksternal.

Penataan dan distribusi sumber daya manusia aparatur negara juga mendapat perhatian yang besar. Pada 24 Agustus 2011 ditandatangani surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara untuk moratorium penerimaan PNS

yang berlaku dari tanggal 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012. Demikian juga dengan munculnya himbauan untuk pensiun dini bagi PNS, menjadi sebuah kesatuan untuk melakukan perampingan dan penataan organisasi pemerintahan. Rekrutmen PNS baru diproyeksikan melalui analisis kebutuhan jabatan yang ketat serta berbasis kompetensi yang dibutuhkan organisasi. Standar tingkat pendidikan yang dibutuhkan juga semakin tinggi. Dengan terbitnya PP No. 48 Tahun 2005 jo. PP No. 43 Tahun 2007, pemerintah memutuskan untuk mengangkat semua tenaga honorer yang telah bertahun-tahun bekerja. Sejak dikeluarkannya peraturan tersebut, seluruh pimpinan instansi pemerintah dilarang untuk mengangkat tenaga honorer, kecuali diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tabel 1.1. menyajikan distribusi jumlah PNS menurut pangkat/ golongan dan di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua pada tahun 2014, pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pegawai terbanyak terdapat pada kabupaten Merauke dengan jumlah pegawai sebanyak 5821 orang diikuti oleh Kota Jayapura yaitu sebanyak 5120 orang, sementara jumlah pegawai paling sedikit terdapat pada Kabupaten Deiyai yang hanya sebanyak 869 orang.

**Tabel. 1.1. Jumlah PNS Menurut Unit Kerja dan Tingkat Kepangkatan di Provinsi Papua, Tahun 2014**

Unit Kerja	Pangkat/Golongan/Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemerintah Provinsi Papua	162	2 367	4 332	528	7 389
Pemerintah Kabupaten/Kota					
Merauke	180	2 113	2 527	1 001	5 821
Jayawijaya	281	1 721	1 768	372	4 142
Jayapura	108	1 341	2 573	861	4 883
Nabire	74	1 515	2 690	556	4 835
Kepulauan Yapen	130	1 328	2 098	519	4 075
Biak Numfor	142	1 609	2 398	561	4 710
Paniai	148	1 264	1 017	185	2 614
Puncak Jaya	129	907	938	122	2 096
Mimika	117	1 584	2 039	469	4 209
Boven Digoel	85	1 066	903	130	2 184
Mappi	174	1 221	986	198	2 579
Asmat	180	1 076	1 033	216	2 505
Yahukimo	331	993	1 098	90	2 512
Pegunungan Bintang	245	1 096	770	59	2 170
Tolikara	231	1 376	713	59	2 379
Sarmi	53	812	673	100	1 638
Keerom	74	976	969	247	2 266
Waropen	68	752	694	116	1 630
Supiori	53	1 130	865	92	2 140
Mamberamo Raya	27	622	366	43	1 058
Nduga	41	472	469	53	1 035
Lanny Jaya	66	693	805	70	1 634
Mamberamo Tengah	36	783	490	43	1 352
Yalimo	2	711	615	40	1 368
Puncak	141	550	447	36	1 174
Dogiyai	27	668	468	79	1 242
Intan Jaya	18	487	406	47	958
Deiyai	12	407	395	55	869
Kota Jayapura	69	1 080	2 727	1 244	5 120
<b>Jumlah</b>	<b>3 404</b>	<b>32 720</b>	<b>38 272</b>	<b>8 191</b>	<b>82 587</b>

Sumber : Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Nasional Provinsi Papua

### 1.1.2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

UU 22/1999 dan UU 25/1999 yang diberlakukan sejak 1 Januari 2001 telah mengakibatkan perubahan yang sangat besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Ada dua bentuk perubahan besar terjadi yaitu *pertama*, penghapusan sistem pemerintahan bertingkat sebagaimana ditetapkan oleh UU 5/1974. UU 22/1999 tentang sistem pemerintahan daerah memberikan otonomi luas pada daerah Kabupaten dan Kota (dulu disebut sebagai Kabupaten dan Kotamadya atau Dati II). Sedangkan Provinsi diberikan otonomi terbatas. Tidak ada hubungan hierarki Provinsi dengan Kabupaten/Kota. *Kedua*, DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah mempunyai peranan jauh lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan keberhasilan sistem pemerintahan daerah yang baru ini yang disebut juga aturan tentang “otonomi daerah”, Pemerintah melakukan perubahan yang besar pula dalam Hubungan Keuangan Pusat - Daerah yang diatur oleh UU 25/1999. Pemerintah, berdasarkan undangundang tersebut memberikan bantuan dan sumbangan pada Daerah dalam bentuk “Dana Alokasi Umum (DAU)”. Penggunaan dana ini sepenuhnya ditentukan oleh Daerah (Pemerintah Daerah bersama DPRD).

**Tabel.1.2 Jumlah Anggota DPRD Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, Periode 2014-2019**

Provinsi/Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total	% Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Provinsi Papua</b>	<b>48</b>	<b>7</b>	<b>55</b>	<b>12,73</b>
Merauke	25	5	30	16,67
Jayawijaya	28	2	30	6,67
Jayapura	24	1	25	4,00
Nabire	20	5	25	20,00
Kep. Yapen	20	0	20	0,00
Biak Numfor	21	4	25	16,00
Paniai	25	0	25	0,00
Puncak Jaya	28	2	30	6,67
Mimika	*	*	*	*
Boven Digoel	19	1	20	5,00
Mappi	22	3	25	12,00
Asmat	24	1	25	4,00
Yahukimo	33	2	35	5,71
Pegunungan Bintang	22	3	25	12,00
Tolikara	17	3	20	15,00
Sarmi	18	2	20	10,00
Keerom	19	1	20	5,00
Waropen	19	1	20	5,00
Supiori	17	3	20	15,00
Mamberamo Raya	18	2	20	10,00
Nduga	21	4	25	16,00
Lanny Jaya	23	2	25	8,00
Mamberamo Tengah	19	1	20	5,00
Yalimo	20	0	20	0,00
Puncak	25	0	25	0,00
Dogiyai	19	1	20	5,00
Intan Jaya	20	0	20	0,00
Deiyai	20	0	20	0,00
Kota Jayapura	29	11	40	27,50

Sumber: Kesbangpol Provinsi Papua

Upaya *affirmative action* untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik terus disuarakan, seperti pada pelaksanaan pemilu 2009, peraturan perundangundangan telah mengatur kuota 30% perempuan bagi partai politik (parpol) dalam menempatkan calon anggota legislatifnya. Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat. Kampanye kuota ini adalah bentuk perjuangan politik lanjutan perempuan setelah tuntutan hak pilih bagi perempuan di awal abad 20 tercapai. Kampanye kuota bertujuan untuk melawan domestifikasi, perempuan (melawan politik patriarki), karena domestifikasi dan dominasi laki-laki atas perempuan dalam budaya patriarki bukanlah takdir. Untuk itu kampanye kuota tidak selesai dalam wujud keterwakilan perempuan dalam partai politik dan parlemen. Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase anggota DPRD perempuan tertinggi di DPRD Kota Jayapura yang mencapai 27,50 persen, sedangkan yang terendah di DPRD Kep. Yapen, Yalimo, Puncak, Intan Jaya dan Deiyai, tidak ada anggota dewan perempuan di Kabupaten tersebut. Untuk anggota DPRD Provinsi Sendiri hanya sebesar 12,73 persen yang perempuan.

## 1.2. Keamanan

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia, rasa aman berada pada tingkatan yang kedua dibawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting. Rasa aman (security) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "..... Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ....."". Kewajiban ini secara eksplisit juga

tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Keamanan suatu wilayah tidak terlepas dari fasilitas keamanan yang tersedia di wilayah tersebut. Di Provinsi Papua terdapat 1 Polda, 20 Polres/Polresta, 118 Polsek/Polsekta dan 57 Pos Polisi yang didukung sebanyak 7.519 personil polisi dengan rasio penduduk per polisi sebesar 411,098 yang artinya satu personel polisi menjamin keamanan 411 penduduk.

Tabel 1.4. menunjukkan bahwa personel polisi di Papua masih didominasi oleh laki-laki, bahkan di beberapa kabupaten seperti Paniai, Puncak Jaya, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Sarmi, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya dan Lanny Jaya tidak memiliki Polisi Wanita (Polwan) sama sekali.

Secara umum kondisi kemanan di Provinsi Papua tidak menunjukkan keadaan yang semakin membaik, jumlah tindak kejahatan meningkat dari 5.932 pada tahun 2012 menjadi 5.941 pada tahun 2013. Namun resiko penduduk terkena tindak kejahatan menurun dari 363.162 penduduk pada tahun 2012 menjadi 353.777 pada tahun 2013.

**Tabel 1.3. Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Tahun 2013**

Kabupaten/ Kota	Polres/ Polresta	Polsek/Polsekta	Pos Polisi
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	1	11	7
Jayawijaya	1	7	5
Jayapura	1	12	1
Nabire	1	7	8
Kepulauan Yapen	1	6	1
Biak Numfor	1	9	4
Paniai	1	6	-
Puncak Jaya	1	5	-
Mimika	1	10	1
Boven Digoel	1	7	2
Mappi	1	6	4
Asmat	1	7	-
Yahukimo	1	1	3
Pegunungan Bintang	1	3	3
Tolikara	1	2	2
Sarmi	1	5	1
Keerom	1	5	3
Waropen	1	2	7
Supiori	1	2	3
Mamberamo Raya	1	4	-
Nduga	-	-	-
Lanny Jaya	1	3	-
Mamberamo Tengah	-	-	-
Yalimo	-	-	-
Puncak	-	-	-
Dogiyai	-	-	-
Intan Jaya	-	-	-
Deiyai	-	-	-
Kota Jayapura	1	5	2
<b>Provinsi Papua</b>	<b>20</b>	<b>118</b>	<b>57</b>

Sumber: Polda Papua

**Tabel 1.4. Jumlah Polisi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, Tahun 2013**

Kabupaten/ Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	541	27	568
Jayawijaya	273	4	277
Jayapura	556	27	583
Nabire	562	12	574
Kepulauan Yapen	323	9	332
Biak Numfor	445	20	465
Paniai	322	-	322
Puncak Jaya	223	-	223
Mimika	263	22	285
Boven Digoel	302	-	302
Mappi	223	3	226
Asmat	216	-	216
Yahukimo	177	-	177
Pegunungan Bintang	146	-	146
Tolikara	215	-	215
Sarmi	284	-	284
Keerom	363	3	366
Waropen	236	-	236
Supiori	255	-	255
Mamberamo Raya	583	-	583
Nduga	-	-	-
Lanny Jaya	100	-	100
Mamberamo Tengah	-	-	-
Yalimo	-	-	-
Puncak	-	-	-
Dogiyai	-	-	-
Intan Jaya	-	-	-
Deiyai	-	-	-
Kota Jayapura	746	38	784
<b>Provinsi Papua</b>	<b>7 354</b>	<b>165</b>	<b>7 519</b>

Sumber: Polda Papua

**Tabel 1.5. Jumlah Tindak Kejahatan yang dilaporkan (*Crime Total*) Menurut Kabupaten/ Kota, 2011-2013**

Kabupaten/ Kota	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	441	331	86
Jayawijaya	264	394	266
Jayapura	306	308	421
Nabire	354	585	570
Kepulauan Yapen	227	175	216
Biak Numfor	175	477	469
Paniai	37	22	21
Puncak Jaya	12	19	8
Mimika	552	738	1 136
Boven Digoel	12	2	-
Mappi	65	128	79
Asmat	41	32	12
Yahukimo	32	13	3
Pegunungan Bintang	11	12	5
Tolikara	26	22	8
Sarmi	20	43	40
Keerom	14	27	26
Waropen	4	24	22
Supiori	24	36	19
Mamberamo Raya	-	-	-
Nduga	-	-	-
Lanny Jaya	-	-	-
Mamberamo Tengah	-	-	-
Yalimo	-	-	-
Puncak	-	-	-
Dogiyai	-	-	-
Intan Jaya	-	-	-
Deiyai	-	-	-
Kota Jayapura	2 375	2 544	2 534
<b>Provinsi Papua</b>	<b>4 992</b>	<b>5 932</b>	<b>5 941</b>

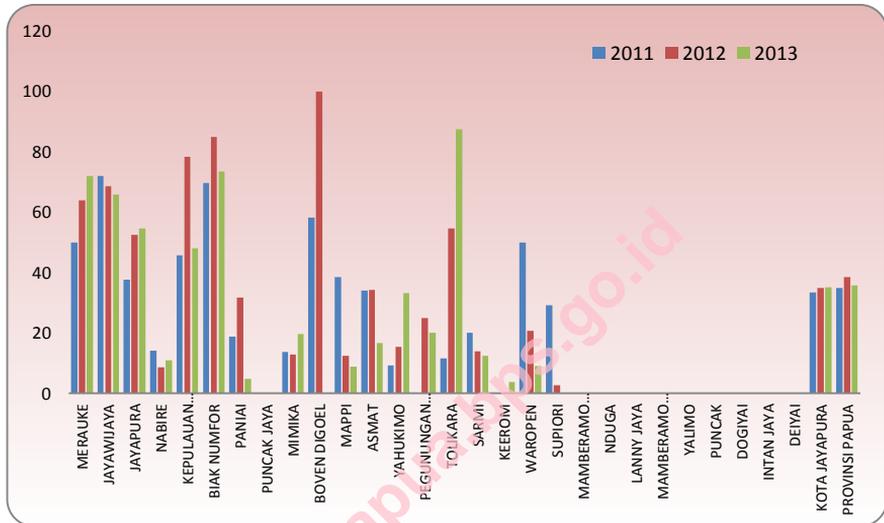
Sumber: Polda Papua

**Tabel 1.6. Jumlah Tindak Kejahatan yang diselesaikan (*Crime Cleared*)  
Menurut Kabupaten/ Kota, 2011-2013**

Kabupaten/ Kota	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	220	212	62
Jayawijaya	190	270	175
Jayapura	115	162	230
Nabire	50	51	63
Kepulauan Yapen	104	137	104
Biak Numfor	122	405	345
Paniai	7	7	1
Puncak Jaya	-	-	-
Mimika	76	95	223
Boven Digoel	7	8	2
Mappi	25	16	7
Asmat	14	11	2
Yahukimo	3	2	1
Pegunungan Bintang	-	3	1
Tolikara	3	12	7
Sarmi	4	6	5
Keerom	-	-	1
Waropen	2	5	2
Supiori	7	1	-
Mamberamo Raya	-	-	-
Nduga	-	-	-
Lanny Jaya	-	-	-
Mamberamo Tengah	-	-	-
Yalimo	-	-	-
Puncak	-	-	-
Dogiyai	-	-	-
Intan Jaya	-	-	-
Deiyai	-	-	-
Kota Jayapura	794	888	891
<b>Provinsi Papua</b>	<b>1 743</b>	<b>2 291</b>	<b>2 122</b>

Sumber: Polda Papua

**Gambar 1.1. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Clearance Rate) Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2013**



Sumber: Polda Papua

**Tabel 1.7. Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (*Crime Clock*) Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2013**

Kabupaten/ Kota	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	19°50',53"	1,2°26',53"	4,05°51',22"
Jayawijaya	1,9°10',05"	22°13',26"	1,8°55',41"
Jayapura	1,4°36',29"	1,4°26',24"	20°47',02"
Nabire	1 hari	14°57',07"	15°21',36"
Kepulauan Yapen	1,14°34',5"	2 hari	1,16°32',10"
Biak Numfor	2,02°02',24"	18°21',36"	18°40',19"
Paniai	9,20°44',10"	16,14°09',36"	17,09°07',12"
Puncak Jaya	30,09°59',02"	19 hari, 05 jam	45 hari, 15jam
Mimika	15°51',50"	11°51',22"	07°42',14"
Boven Digoel	30,09°59',02"	182 hari, 12 jam	0
Mappi	5,14°45',36"	2,20°25',26"	4,14°52',48"
Asmat	8,21°38',53"	11,09°44',38"	30,09°59',02"
Yahukimo	11,09°44',38"	28,01°49',26"	121,15°59',02
Pegunungan Bintang	33,04°20',38"	30,09°59',02"	73 hari
Tolikara	14 hari	16,14°09',36"	45 hari,15jam
Sarmi	18 hari 6 jam	8,11°42',43"	9 hari, 03jam
Keerom	26,01°42',14"	13,12°25',25"	14 hari
Waropen	91 hari, 6 jam	15,04°59',31"	16,14°09',36"
Supiori	15,04°59',31"	10,03°18',43"	19,05°02',24"
Mamberamo Raya	-	-	-
Nduga	-	-	-
Lanny Jaya	-	-	-
Mamberamo Tengah	-	-	-
Yalimo	-	-	-
Puncak	-	-	-
Dogiyai	-	-	-
Intan Jaya	-	-	-
Deiyai	-	-	-
Kota Jayapura	03°40',19"	03°25',55"	03°27',22"
<b>Provinsi Papua</b>	<b>01°45',07"</b>	<b>01°27',50"</b>	<b>01°27',50"</b>

Sumber: Polda Papua

**Tabel 1.8. Resiko Penduduk Terkena Kejahatan (*Crime Rate*) di Provinsi Papua, Tahun 2011-2013**

Kabupaten/ Kota	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	21 002	15 763	4 096
Jayawijaya	12 999	19 401	13 098
Jayapura	25 760	25 928	35 441
Nabire	25 786	42 613	41 520
Kepulauan Yapen	25 741	19 844	24 493
Biak Numfor	12 955	35 312	34 720
Paniai	2 294	1 364	1 302
Puncak Jaya	1 071	1 696	714
Mimika	28 106	37 576	57 841
Boven Digoel	1 987	331	0
Mappi	7 386	14 544	8 977
Asmat	4 824	3 765	1 412
Yahukimo	1 828	742	171
Pegunungan Bintang	1 587	1 732	721
Tolikara	2 075	1 755	638
Sarmi	5 633	12 110	11 265
Keerom	2 704	5 215	5 022
Waropen	1 487	8 920	8 177
Supiori	14 138	21 206	11 192
Mamberamo Raya	-	-	-
Nduga	-	-	-
Lanny Jaya	-	-	-
Mamberamo Tengah	-	-	-
Yalimo	-	-	-
Puncak	-	-	-
Dogiyai	-	-	-
Intan Jaya	-	-	-
Deiyai	-	-	-
Kota Jayapura	87 142	93 343	11 192
<b>Provinsi Papua</b>	<b>286 503</b>	<b>363 162</b>	<b>353 777</b>

Sumber: Polda Papua

# AKSES AIR MINUM LAYAK DI PROVINSI PAPUA SEMAKIN MEMBAIK



PERSENTASE RUMAH TANGGA  
YANG MEMILIKI AKSES AIR MINUM LAYAK, 2011-2014



2011

2012

2013

2014

# 3,21%

PENINGKATAN RUMAH TANGGA  
YANG MEMILIKI AKSES AIR MINUM LAYAK  
SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR

“PENGUNAAN AIR BERSIH ADALAH  
SALAH SATU INDICATOR  
KESEHATAN LINGKUNGAN & PEMUKIMAN”

## **BAB II**

### **Lingkungan Hidup**

Pembangunan dan lingkungan hidup mempunyai hubungan yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pertumbuhan pembangunan di satu sisi akan memberikan kontribusi positif terhadap taraf hidup masyarakat. Namun di sisi lain akan dapat menyebabkan turunnya fungsi lingkungan. Alih fungsi lahan untuk pembangunan secara langsung akan mengurangi luas lahan hijau, baik lahan pertanian maupun kawasan hutan yang merupakan sumber penghasil oksigen. Sementara meningkatnya pemakaian bahan bakar fosil sebagai sumber energi justru menyumbang gas karbon yang akhirnya berdampak pada perubahan iklim yang terjadi karena efek rumah kaca. Kontradiksi antara kepentingan pembangunan dan kepentingan pelestarian lingkungan ini memerlukan upaya dan langkah nyata agar keduanya dapat dilakukan secara seimbang dan harmonis, sesuai amanat pembangunan berkelanjutan yakni pembangunan dengan memperhatikan tiga pilar utama ekonomi yakni ekonomi, lingkungan dan sosial.

Manusia berada di lingkungan hidup binaan yang saling berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan hidup alam. Sementara hubungan manusia dengan sesama manusia membentuk lingkungan hidup sosial. Secara berangsur-angsur manusia mulai mendominasi ekosistem dan membentuk

lingkungan hidup sosial serta sekaligus menciptakan lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan berkembang sesuai dengan perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan ketiga unsur lingkungan hidup ini perlu berkembang secara serasi dan seimbang. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada terwujudnya kelestarian, keseimbangan, dan keserasian yang dinamis antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan lingkungannya. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan mutu/kualitas hidup, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan merehabilitasi kerusakan lingkungan. Pesatnya pembangunan di daerah perkotaan jauh lebih besar pengaruh dan dampak terhadap lingkungan dibandingkan dengan di daerah perdesaan.

Di daerah perkotaan, lingkungan alam sangat sulit dipertahankan kelestarian wujud aslinya sebagai akibat lingkungan buatan manusia. Terjadinya pencemaran air, udara, tanah, sampah, dan kebisingan suara merupakan wujud nyata dari pengaruh negatif perubahan lingkungan alami oleh kegiatan manusia. Pertambahan penduduk telah menjadi penyebab perubahan daerah pemukiman baru yang akan menyebabkan pula terjadinya perubahan lingkungan sosial budaya. Manusia dengan lingkungan hidup sosialnya maupun keadaan lingkungan hidup secara keseluruhan mempengaruhi kualitas hidup. Untuk memelihara dan meningkatkan kualitas hidup, memanfaatkan sumber

daya alam secara berkelanjutan dan menghindari terjadinya kerusakan lingkungan hidup, maka pembangunan dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan. Pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh para pengelola lingkungan hidup membutuhkan informasi mengenai lingkungan hidup. Informasi tersebut memotret kondisi lingkungan pada suatu waktu, baik mengevaluasi tingkat kerusakan yang terjadi, perbaikan yang telah dilakukan, maupun langkah-langkah yang perlu disusun sebagai bahan masukan bagi perencanaan lingkungan di waktu mendatang. Para pembuat kebijakan perlu memasukkan faktor lingkungan dalam semua pertimbangan kegiatannya, ditunjang informasi tentang lingkungan hidup yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi pada lingkungan hidup, perlu dikembangkan indikator yang dapat mengukur kualitas lingkungan hidup. Statistik sebagai alat bantu yang sering dipakai untuk melihat fenomena dan perilaku lingkungan hidup perlu terusmenerus disusun dan dikembangkan dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Statistik dalam arti sempit adalah data ringkasan berbentuk angka (kuantitatif). Sedangkan dalam arti luas, statistik berarti suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan penelitian yang tidak menyeluruh. Statistik lingkungan hidup merupakan data hasil

pengolahan dan penyajian yang berhubungan dengan keadaan lingkungan hidup. Dari data tersebut akan dilihat kondisi lingkungan hidup pada suatu waktu dan waktu-waktu sebelumnya. Penggunaan statistik lingkungan hidup diantaranya untuk menganalisis keadaan masa datang, sehingga dapat segera dibuat terapi bagi perbaikan lingkungan hidup. Hingga saat ini data mengenai lingkungan hidup dikumpulkan dan disebar oleh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, institusi riset, dan organisasi internasional. Institusi-institusi tersebut mengumpulkan data melalui kegiatan sensus, survei, pemantauan, dan catatan-catatan administrasi yang ada. Sebagai contoh, data tentang kualitas lingkungan didasarkan pada kebutuhan dan disajikan dalam waktu yang tidak rutin dan ruang terbatas. Misalnya data kualitas air dan analisis debu yang mengambang di udara tersebut melalui lebih dari satu instansi, baik kementerian atau lembaga sehingga memerlukan usaha dan ketelitian memperoleh kecocokan akurasi. Data yang disajikan belum sepenuhnya memenuhi harapan dan belum dapat digunakan untuk menggambarkan kualitas lingkungan hidup. Seperti banyak negara lain, statistik lingkungan di Indonesia dianggap kurang berkembang, terutama dibandingkan dengan statistik demografi, sosial, dan ekonomi. Masalah lingkungan yang sangat luas dan rumit, serta metode dan teknik pengumpulan, penyajian, dan penafsiran statistik membutuhkan ketelitian. Dengan demikian, kerangka kerja

statistik lingkungan harus mengalami perbaikan terus menerus. BPS telah mengadopsi dua kerangka kerja dan akan terus memperbaiki kerangka tersebut sehingga akan mendapatkan kerangka yang tepat dan up to date. Indonesia telah memiliki kerangka kerja Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (*Indonesia Framework for the Development of Environment Statistics/IFDES*) sejak tahun 1999. Bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendali Dampak Lingkungan (BAPEDAL), BPS mengembangkan kerangka yang mengacu pada prinsip utama dari UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kerangka Kerja PBB untuk Pengembangan Statistik Lingkungan Hidup (*United Nations Framework for the Development of Environment Statistics/UNFDES*).

IFDES dibentuk dengan menggabungkan prinsip pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan prosedur untuk mengkategorikan informasi berdasarkan UNFDES. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup juga merupakan suatu sistem dengan tiga sub sistem utama yang saling berkaitan, yaitu lingkungan alam (ekosistem),

lingkungan hidup buatan/binaan (tekno sistem), dan lingkungan hidup sosial (sosio sistem). Lingkungan alam didefinisikan sebagai lingkungan yang belum tersentuh dan tidak diciptakan oleh manusia. Dalam lingkungan alam, manusia memanfaatkan sumber daya alam sebagai sarana ekonomi melalui kegiatan pertambangan, pertanian, industri, ekonomi, transportasi, perumahan, dan lainnya. Lingkungan ini dikatakan sebagai lingkungan buatan manusia. Selain itu, manusia secara bertahap mendominasi ekosistem dan membentuk kelompok sosial. Interaksi kelompok sosial dan pembentuk lingkungan social ini meliputi keragaman dan nilai-nilai budaya. Dalam IFDES juga diklasifikasikan ke dalam tiga komponen lingkungan tersebut.

Variabel lingkungan untuk masing-masing komponen tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori informasi yang diadaptasi dari kerangka UNFDES. Kategori informasi tersebut mencerminkan tekanan, dampak, dan respon. Masalah lingkungan adalah hasil dari kegiatan manusia dan peristiwa alam (tekanan/pressure). Kegiatan manusia dan peristiwa alam dikatakan memiliki dampak pada lingkungan (dampak/state). Sehingga memicu upaya atau respon individu dan sosial untuk menghindari atau mengurangi dampak lingkungan tersebut (response). Kategori informasi yang digunakan dalam IFDES juga mencakup ketiga kategori tersebut yaitu tekanan, dampak, dan respon. Peran statistik lingkungan saat ini sangat penting dalam

menggambarkan kondisi lingkungan yang sekarang ini cenderung memburuk. Kehadiran statistik lingkungan dapat mencerminkan kesadaran suatu negara terhadap perlindungan lingkungan hidup. BPS sebagai salah satu lembaga negara peduli akan perlindungan lingkungan hidup dan berusaha mengumpulkan data-data statistik lingkungan. Keragaman sumber data statistik lingkungan meliputi aspek yang sangat luas sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengumpulannya. Kegiatan pengumpulan data statistik lingkungan membutuhkan koordinasi antar lembaga pemerintahan. Hal ini sulit untuk dilakukan karena diperlukan dukungan dan koordinasi yang baik dari seluruh lembaga pemerintahan itu sendiri. Pengumpulan data yang berkelanjutan serta relevan dan penting sangat sulit dilakukan. Kebanyakan lembaga pemerintahan mengumpulkan data berdasarkan kebutuhan mereka. Data yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari sensus atau survei yang dilakukan oleh BPS dan laporan tahunan instansi yang terkait lingkungan hidup secara luas.

### **2.1. Konsep dan Definisi**

Konsep dan definisi lingkungan hidup secara umum mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

5. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
6. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
7. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
8. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
9. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
10. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan

ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

11. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan baik langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
12. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
13. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
14. Lingkungan alam didefinisikan sebagai lingkungan alam murni yang keberadaannya bukan disebabkan oleh manusia. Lingkungan ini diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Unit Lingkungan alam adalah alam itu sendiri, sedangkan komponen atau media lingkungan alam mencakup hutan, lahan air, flora fauna, mineral dan udara.
15. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang terbentuk atas upaya manusia mengembangkan teknologi dengan memanfaatkan sumber daya untuk memfasilitasi aktivitasnya, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Contoh lingkungan buatan diantaranya adalah pemukiman, pabrik, sarana dan prasarana berupa bangunan, jalan, serta sarana fisik lain yang

- dibangun oleh manusia untuk melaksanakan aktivitas ekonomi dan sosial budaya, termasuk juga hutan yang telah diubah menjadi hutan produksi.
16. Lingkungan sosial adalah lingkungan non fisik yang merupakan hasil interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat atau komunitasnya, yang muncul dalam berbagai fenomena seperti demografi, kesehatan, nilai-nilai sosial budaya, kelompok sosial, ketenagakerjaan, aktivitas sosial, serta kriminalitas.
  17. Tekanan adalah semua aktivitas kegiatan sosial ekonomi dan alam menekan terhadap lingkungan alam, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial.
  18. Dampak aktivitas adalah pengaruh perubahan dari aktivitas yang dilakukan pada lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
  19. Respon adalah upaya yang dilakukan mencakup beberapa komponen yang berkaitan dengan upaya penyelamatan, penjagaan, maupun rehabilitasi pada lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial.
  20. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

21. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas, dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Kawasan hutan dibagi ke dalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi.
22. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, hutan konservasi terdiri dari:
  - a) Kawasan suaka alam berupa Cagar Alam (CA) dan Suaka Marga Satwa (SM);
  - b) Kawasan pelestarian alam berupa Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR), dan Taman Wisata Alam (TWA);
  - c) Taman Buru (TB).
23. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata

air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

24. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat dikonservasi.
25. Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
26. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
27. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
28. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa

- gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
29. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan epidemi.
30. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang di atas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor yang dicatat adalah semua jenis kendaraan kecuali kendaraan bermotor TNI/Polri dan Korps Diplomatik.
31. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk sebanyak-banyaknya delapan orang, tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi, baik dilengkapi atau tidak dilengkapi bagasi.
32. Mobil bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk lebih dari delapan orang, tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi, baik dilengkapi atau tidak dilengkapi bagasi.

33. Mobil truk adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang, selain mobil penumpang, mobil bis, dan kendaraan bermotor roda dua.
34. Perikanan budidaya adalah kegiatan ekonomi dalam bidang budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Untuk keperluan statistik, perikanan budidaya diklasifikasikan atas; budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya keramba, budidaya jaring apung, dan budidaya di sawah.
35. Perahu/kapal tanpa motor adalah perahu yang tidak menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak, tetapi menggunakan layar atau dayung.
36. Perahu/kapal motor tempel adalah perahu/jukung yang menggunakan tenaga penggerak tempel, baik yang dipasang pada sebelah luar buritan maupun bagian sisi atas lambung perahu atau jukung.
37. Perahu/kapal motor adalah perahu/ kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak dan dipasang secara permanen di dalam kapal.
38. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
39. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.

40. Tempat penampungan sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

## **2.2. Lingkungan Alam**

Lingkungan alam dapat diartikan sebagai lingkungan yang natural dan sudah ada, tidak dibuat dan didominasi oleh manusia. Pada proses pembangunan yang dilakukan oleh manusia pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus tanpa memperhatikan kelestariannya dikhawatirkan dapat mengakibatkan kemerosotan kualitas lingkungan alam yang ada. Konsisi ini terjadi karena kurang meluasnya pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai lingkungan hidup sehingga partisipasi masyarakat dalam usaha pelestarian lingkungan hidup masih sangat rendah.

Permasalahan lingkungan yang dihadapi Indonesia pada saat ini antara lain menurunnya mutu dan luas hutan, bertambahnya areal kritis yang tidak produktif, erosi, pencemaran air, jenis binatang dan tumbuhan yang berkurang, serta lingkungan pemukiman yang semakin padat dan tidak sehat.

Permasalahan ini tentunya menuntut perhatian dari semua pihak, tidak hanya pemerintah namun kesadaran dari masyarakat sangat dibutuhkan demi terjaganya kelestarian lingkungan.

### 2.2.1. Iklim

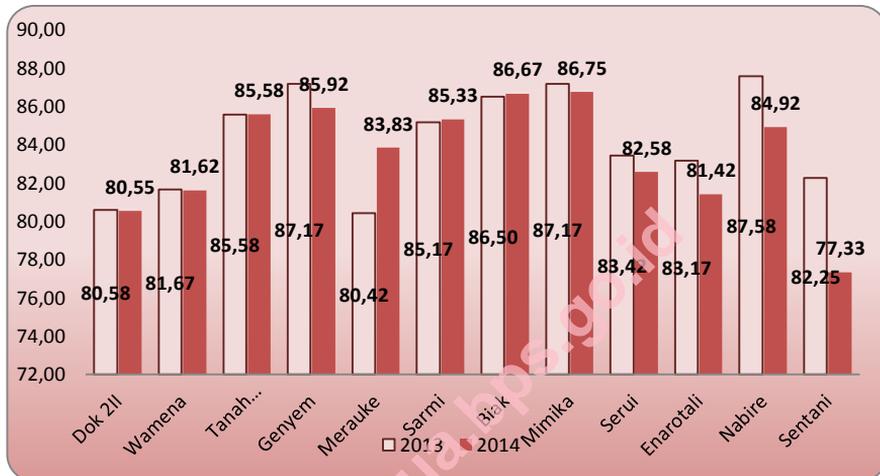
Berdasarkan data iklim dari stasiun pengamatan BMKG di 12 stasiun pengamatan di Provinsi Papua suhu udara rata-rata terendah tercatat di stasiun pengamatan Enarotali (18,18°C) suhu tertinggi tercatat pada stasiun pengamatan DokII Jayapura (28,10°C). Jika dibandingkan tahun 2013 dan 2014 tercatat kenaikan rata-rata suhu udara di enam stasiun BMKG, yakni pada stasiun dok II, Tanah Merah, Biak, Enarotali, Nabire dan Sentani. Sementara pada enam stasiun BMKG yang lain seperti, Wamena, Genyem, Merauke, Sarmi, Mimika dan Serui mengalami penurunan rata-rata suhu udara.

**Gambar 2.1. Suhu Udara Rata-rata (°C) di Provinsi Papua, Tahun 2013-2014**



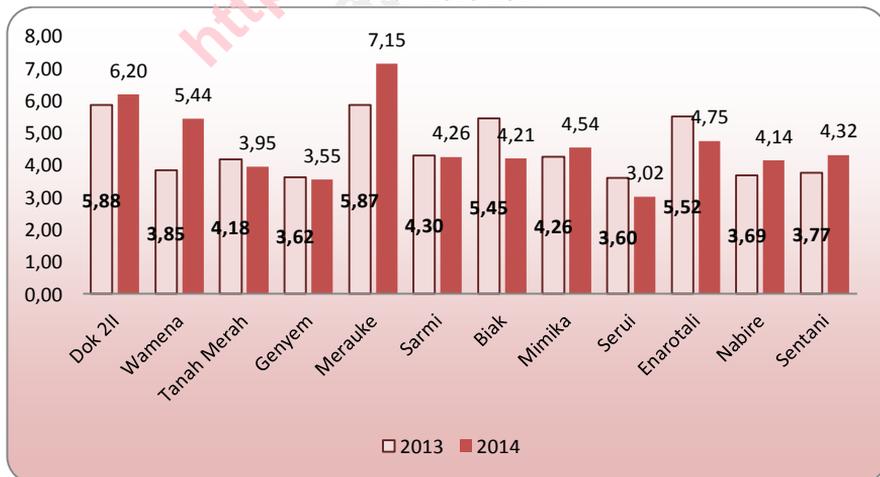
Sumber: Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Papua

**Gambar 2.2. Kelembaban Udara Rata-rata (%) di Provinsi Papua, Tahun 2013-2014**



Sumber: Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Papua

**Gambar 2.3. Rata-rata Kecepatan Angin (Knot) di Provinsi Papua, Tahun 2013-2014**



Sumber: Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Papua

**Tabel 2.1. Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, Tekanan Udara dan Penyinaran Matahari di Provinsi Papua, Tahun 2014**

Stasiun Pengamatan	Jumlah Curah Hujan (milimeter)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Tekanan Udara (mb)	Penyinaran Matahari (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dok II	248.27	18.36	1010.76	57.25
Wamena	108.44	24.64	1009.11	56.77
Tanah Merah	370.09	23.36	1011.53	46.04
Genyem	261.55	19.00	1011.37	52.95
Merauke	94.55	13.09	1011.25	52.08
Sarmi	222.08	19.50	1010.97	59.63
Biak	217.08	18.50	1010.65	53.14
Mimika	470.67	25.75	1012.48	40.79
Serui	227.92	19.50	1008.48	60.98
Enarotali	158.25	19.42	-	57.64
Nabire	240.83	16.17	1010.24	66.23
Sentani	170.00	17.42	1009.91	56.50
<b>Rata-rata</b>	232.48	19.56	926.39	55.00

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Papua

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa curah hujan tertinggi tercatat di stasiun Mimika (470,67 milimeter) sedang yang terendah pada stasiun wamena (108,44 milimeter) , dengan jumlah hari hujan tertinggi tercatat pada stasiun mimikan yaitu 26 hari dan jumlah hari hujan terendah tercatat di stasiun Merauke. Tekanan udara tertinggi pada tahun 2014 tercatat pada stasiun Mimika, yaitu 1012,48 milibar sedang tekanan udara terendah tercatat pada Stasiun Wamena yaitu 1009,11 milibar.

### 2.2.2. Sumber Daya air

Air bersih merupakan kebutuhan utama manusia dan lingkungan. Efisiensi penggunaan air merupakan kunci untuk menyesuaikan kebutuhan dan persediaan air. Tekanan pada sumber daya air dipicu oleh pemakaian berlebih dan kualitas lingkungan yang semakin menurun. Dampak buruk penggunaan air secara tidak efisien antara lain pendangkalan sungai, kelangkaan air, salinasi air di daerah pantai, masalah kesehatan masyarakat, hilangnya hutan bakau, penggundulan hutan, dan menurunnya produksi pangan. Kegiatan industri, pertanian, dan limbah domestik merupakan penyebab utama polusi air. Beban solusi air banyak terjadi di Pulau Jawa karena Pulau Jawa merupakan pusat industrialisasi dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Polusi air yang serius terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Komitmen untuk mencegah dan mengontrol polusi air lebih kuat sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 terkait tentang Pengendalian Pencemaran Air. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut air dibagi menjadi empat kategori, yaitu Kelas A (dapat diminum langsung), kelas B (berfungsi sebagai air baku air minum). Kelas C (untuk keperluan peternakan dan pertanian), kelas D (untuk keperluan pertanian, industri, dan pembangkit listrik tenaga air).

**Tabel 2.2. Kualitas Air Sungai di Ibukota Provinsi yang Digunakan Bahan Baku Air Minum, Tahun 2014**

Parameter Yang diukur	Satuan	Lokasi Sampel					
		Biak Numfor			Merauke		Nabire
		Air PDAM Snerbo	Air Kali Ruar	Air Rawa	Air Sumur Bor Nono Suwanto	Air Sumur Bor Mandala	Intek PDAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
pH	mg/L	7.61	7.9	6.9	6.83	6.62	6.58
TDS	mg/L	423	240	210	321	364	82.9
TSS	mg/L	13	23	68	73	21	10
DO	mg/L	5.82	7.25	7.14	7.3	5.99	7.17
BOD	mg/L	9.11	3.32	2.74	1.66	4.45	3.8
COD	mg/L	40	15	10	5	15	10
NO <sub>3</sub>	mg/L	3.8	0.9	0.9	1.6	23	1.2
NH <sub>3</sub>	mg/L	0.1	0.06	0.1	0.28	0.42	< 0.01
SO <sub>4</sub> (Sulfat)	mg/L	29	12	1	41	42	7
Fecal Coli	jml/1000 ml	494	28	2	0	233	166
Total Coli	jml/1000 ml	≥ 1898	55	16	22	294	188

Sumber: BLDH Provinsi Papua

### 2.2.3. Sumber Daya Ikan

Wilayah Indonesia yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah perairan tentunya dapat memberikan Perikanan berperan dalam rantai makanan dan ekosistem perairan. Pembangunan daerah pesisir dan peningkatan kualitas lingkungan memberi tekanan terhadap cadangan ikan. Eksploitasi berlebih berakibat pada cadangan ikan air tawar maupun ikan laut. Budidaya perikanan telah berkembang dengan sangat pesat sehingga ketergantungan terhadap produk pakan menjadikan kompetisi dengan pasar komersil dan dapat menjadi faktor penghambat dalam pengembangan budidaya perikanan.

Pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan menjadi perhatian utama. Dengan meningkatnya volume tangkapan ikan, isu sentral manajemen area penangkapan ikan berkelanjutan adalah apakah abstraksi sumber daya melampaui kemampuan persediaan untuk memperbaharui diri menurut rentang waktu tertentu. Selama periode 2011-2012 terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap baik di perairan umum maupun perairan laut, meskipun telah terjadi penurunan pada tahun 2011.

**Tabel 2.3. Produksi perikanan Tangkap Menurut Jenis Perairan (Ton), Tahun 2009-2012**

Jenis Perairan	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Umum	35 545	40 157	37 174	40 381
laut	47 359	52 123	46 400	54 574

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2012, Kementerian Kelautan dan Perikanan

#### 2.2.4. Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati didefinisikan sebagai keanekaragaman dan variabilitas diantara makhluk hidup, termasuk keanekaragaman ekosistem pada tingkat spesies dan keanekaragaman genetik pada spesies. Konservasi keanekaragaman hayati sudah menjadi perhatian nasional dan global.

Konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan merupakan kesatuan utuh pembangunan berkelanjutan yang memadukan proses integrasi kepentingan keanekaragaman hayati ke dalam kebijakan ekonomi dan juga sebagai alat ukur untuk melindungi wilayah, habitat, dan spesies. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem diterbitkan untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sudah menjadi prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam.

Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui perlindungan sistem penyangga kehidupan (contoh hutan konservasi) dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan yang bertujuan untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi pen jagaan agar unsur-unsur tersebut tidak punah, dapat berfungsi dan siap untuk dimanfaatkan.

Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan sasaran utama yang bisa diukur melalui dua parameter yaitu baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dua parameter ini menjadi indikator apakah rencana usaha dan/atau kegiatan dapat menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup.

Pelestarian lingkungan hidup menghadapi beberapa hambatan utama antara lain sikap mental dan tradisi yang beranggapan bahwa alam memang disediakan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia sehingga menyebabkan eksploitasi alam yang berlebihan. Hambatan lain adalah pembiayaan pemulihan lingkungan yang sudah terlanjur rusak memerlukan biaya yang sangat besar.

Konservasi flora dan fauna harus dilakukan agar kekayaan alam yang

ada dapat terlindungi dan berguna bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya di masa yang akan datang. Untuk melindungi flora dan fauna dari kerusakan maupun kepunahan, dapat dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain pembentukan cagar alam, suaka margasatwa, taman laut, dan taman nasional.

**Tabel 2.4. Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi Menurut Jenis Konservasi, 2010-2011**

Jenis Konservasi	Jumlah (Unit)		Luas (Ha)	
	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Konservasi Daratan</b>				
✓ Cagar Alam	3	3	246 916	246 916
✓ Suaka Margasatwa	1	1	76 110	76 110
✓ Taman Wisata Alam	2	2	2 533	2 533
✓ Taman Nasional	3	3	1 094 330	1 094 330
<b>Konservasi Laut</b>				
✓ Cagar Alam	-	-	-	-
✓ Suaka Margasatwa	-	-	-	-
✓ Taman Wisata Alam	-	-	-	-
✓ Taman Nasional				

Sumber: Statistik Kehutanan Indonesia 2011, Kementerian Kehutanan

### 2.2.5. Bencana Alam

Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia maupun ekosistem yang ada disekitarnya. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, angin puting beliung, badai tropis, tornado, dll. Bencana alam tidak selamanya terjadi karena peristiwa alam, namun dapat juga disebabkan oleh manusia seperti, wabah penyakit, kelaparan, kebakaran hutan dan banjir bandang.

Bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba maupun melalui proses yang berlangsung secara perlahan namun efeknya dapat mengakibatkan dampak yang merusak baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Bencana alam yang menimbulkan dampak cukup besar adalah gempa bumi dan tsunami.

Ketersediaan informasi tentang wilayah rawan bencana penting agar penanganan wilayah bencana baik rehabilitasi infrastruktur maupun penanganan tanggap darurat terhadap korban bencana dapat terantisipasi dengan baik. Untuk mengantisipasi jumlah korban baik jiwa dan materi, diperlukan data dan informasi bencana alam secara berkesinambungan. Data tersebut dapat dijadikan sebagai alat bantu pengambilan keputusan oleh pemerintah.

**Tabel 2.5. Frekuensi Gempa Berdasarkan Kedalaman dan Kekuatan Menurut Pulau, 2013**

Pulau	Kedalaman (Km)			Kekuatan (SR)		
	Dangkal (<60)	Menengah (60-300)	Dalam (>300)	Kecil (<4,0)	Menengah (4,0-5,0)	Besar (>5,0)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	622	117	1	446	258	36
Jawa	414	74	3	320	157	14
Bali	77	21	1	75	21	3
Nusa Tenggara	469	190	9	485	171	12
Kalimantan	-	1	-	-	1	-
Sulawesi	518	251	21	508	273	9
Maluku	518	318	34	322	518	30
Papua	216	36	-	100	135	17
Indonesia	2 834	1 008	69	2 256	1 534	121

*Sumber: Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofsika*

Tabel 2.10 menyajikan data frekuensi gempa berdasarkan kedalaman dan kekuatan menurut pulau selama tahun 2013. Gempa dengan kedalaman kategori dangkal banyak terjadi di Pulau Sulawesi dan Maluku yaitu sebanyak 518 kali. Sedangkan gempa dengan kedalaman kategori menengah banyak terjadi di Pulau Maluku sebanyak 318 kali dan gempa dengan kedalaman kategori dalam juga banyak terjadi di Pulau Maluku sebanyak 34 kali. Kekuatan gempa dalam kategori kecil terjadi sebanyak 2.256 kali dan paling banyak terjadi di Pulau Maluku. Kekuatan gempa dalam kategori sedang terjadi sebanyak 1.534 kali, sedangkan gempa dalam kategori kekuatan besar terjadi sebanyak 121 kali.

### **2.3. Lingkungan Buatan**

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang yang menangkut kehidupan manusia. Pembangunan pada prosesnya tidak dapat terlepas penggunaan sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam tak terbarukan yang pada akhirnya membawa perubahan terhadap lingkungan yang ada. Perubahan lingkungan yang dilakukan oleh manusia pada proses pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lingkungan buatan terbentuk atas upaya manusia dalam memanfaatkan keadaan sekitar agar mempermudah kehidupannya. Dengan demikian lingkungan buatan merupakan hasil dari pembangunan itu sendiri. Contoh dari lingkungan buatan antara lain saran dan prasaran berupa bangunan perumahan, jalan dan sarana fisik lain yang digunakan manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi dan social.

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Manusia bernafas membutuhkan udara dari lingkungan disekitarnya, makan minum serta melakukan interaksi terhadap makhluk lain seperti hewan, tumbuh-tumbuhan dan mikroorganisme. Selain itu manusia tidak dapat lepas dari lingkungan hidup buatan yang merupakan hasil dari proses pembangunan seperti rumah, jalan, waduk, dan sebagainya.

### 2.3.1. Perumahan

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan. Indikator yang termasuk kategori perumahan mengacu pada kualitas perumahan atau sarana dan prasarana pemukiman yang layak, karena sangat erat hubungannya terhadap lingkungan seperti kurangnya fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK) atau fasilitas pengelolaan air limbah domestik dapat menyebabkan pencemaran air, tanah dan pencemaran udara.

Masalah perumahan dan pemukiman merupakan masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Pembangunan perumahan dan pemukiman yang kurang terpadu, terarah dan terencana serta kurang memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana dasar seperti air bersih, sanitasi layak, sistem pengelolaan sampah dan saluran pembuangan air hujan akan memberikan dampak terhadap degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai kawasan kumuh.

Kawasan kumuh meskipun tidak dikehendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya dalam perkembangan wilayah khususnya wilayah perkotaan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam meminimalisir munculnya kawasan kumuh perlu dilakukan upaya-upaya secara kompreensif yang menyangkut berbagai aspek untuk terciptanya perumahan dengan kualitas yang baik dengan kualitas lingkungan yang baik pula.

**Tabel 2.6. Jumlah Desa yang Memiliki pemukiman Kumuh Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2014**

Kabupaten/Kota	Keberadaan Pemukiman Kumuh		Jumlah Lokasi
	Ada	Tidak ada	
(1)	(2)	(3)	(4)
MERAUKE	8	160	15
JAYAWIJAYA	-	332	-
JAYAPURA	3	141	5
NABIRE	12	71	55
KEPULAUAN YAPEN	-	165	-
BIAK NUMFOR	2	262	6
PANIAI	2	68	9
PUNCAK JAYA	1	301	1
MIMIKA	3	149	9
BOVEN DIGOEL	-	110	-
MAPPI	-	164	-
ASMAT	26	186	83
YAHUKIMO	-	518	-
PEGUNUNGAN BINTANG	-	277	-
TOLIKARA	-	528	-
SARMI	-	110	-
KEEROM	-	61	-
WAROPEN	-	80	-
SUPIORI	-	38	-
MAMBERAMO RAYA	-	59	-
NDUGA	-	248	-
LANNY JAYA	-	143	-
MAMBERAMO TENGAH	-	59	-
YALIMO	-	278	-
PUNCAK	-	80	-
DOGIYAI	-	79	-
INTAN JAYA	-	78	-
DEIYAI	-	30	-
KOTA JAYAPURA	12	27	27
<b>PAPUA</b>	<b>69</b>	<b>4802</b>	<b>210</b>

Sumber: BPS, Potensi Desa 2014

**Tabel 2.7. Jumlah dan Persentase Desa Menurut Keberadaan Keluarga yang Tinggal di Bantaran Sungai dan Bawah Jaringan Listrik Tegangan Tinggi, 2014**

Keberadaan Keluarga	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)
<b>Keluarga Tinggal di Bantaran/ Tepi Sungai</b>	<b>366</b>	<b>7,5</b>
<b>Keluarga Tinggal di Bawah Listrik Tegangan Tinggi</b>	-	-

Sumber: *Potensi Desa 2014, Badan Pusat Statistik*

Tempat dimana sebuah rumah atau pemukiman didirikan sangat menentukan tingkat kelayakan dan kesehatan dari rumah dan pemukiman tersebut. Rumah yang didirikan di kawasan marginal, seperti bantaran sungai, di bawah jaringan listrik tegangan tinggi, atau di tempat-tempat kumuh merupakan rumah cenderung tidak sehat dan tidak layak huni. Tabel 2.11 menunjukkan jumlah dan persentase desa yang penduduknya masih ada yang tinggal di daerah marginal. Dari tabel tersebut terlihat bahwa ada 366 desa yang masih ada keluarga yang tinggal di bantaran sungai.

Selain lokasi tempat didirikannya rumah dan pemukiman, keadaan bangunan fisik perumahan juga menunjukkan apakah rumah tersebut merupakan rumah layak huni/ sehat atau tidak. Tabel 2.12 menunjukkan gambaran kondisi perumahan yang ada di Papua selama periode 2011 sampai 2014 berdasarkan data Susenas.

**Tabel 2.8. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan, Tahun 2011-2014**

Fasilitas Perumahan (1)	Tahun			
	2011 (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)
Dinding Terluas Terbuat Bukan dari Tembok dan Kayu	5.01	3.78	3.02	2.63
Atap terluas Terbuat dari Ijuk, daun-daunan dan Lainnya	43.46	41.25	39.9	38.45
Lantai terluas dari Tanah/ Lainnya	31.78	32.63	32.6	31.16
Luas Lantai Perkapita kurang dari 7,2m <sup>2</sup>	54.15	51.23	47.4	43.29
Penampungan Akhir Tinja Bukan Tangki Septik	71.58	70.3	70.26	73.3
Memiliki Akses Air Minum Layak	26,28	25,24	29.52	29.49
Sanitasi Layak	24,31	25,05	25.37	21.66

Sumber: Susenas 2011-2014, BPS Provinsi Papua

Tabel diatas menunjukkan persentase rumah tangga dengan dinding terluas terbuat bukan dari tembok dan kayu pada tahun 2011 hingga tahun 2014 menunjukkan persentase yang sangat kecil, pada tahun 2011 rumah tangga dengan dinding terluas bukan dari beton atau kayu hanya 5,01 persen turun menjadi 2,63 pada tahun 2014. Rumah tangga dengan atap terluas terbuat dari ijuk, daunnan dan lainnya menunjukkan nilai yang selalu mengalami penurunan selama periode 2011-2014, pada tahun 2011 persentase rumah tangga untuk variabel ini sebesar 43,46 persen turun menjadi 41,25 persen pada tahun 2012 dan 39.90 persen pada tahun 2013 kemudian menjadi

38,45 persen pada tahun 2014. Sementara persentase rumah tangga dengan lantai terbuat dari tanah mengalami sedikit penurunan selama periode 2011-2014 walaupun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2012. Dari 31,78 persen pada tahun 2011 mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi 32,63 persen, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2013 menjadi 32,60 dan kembali turun pada tahun 2014 menjadi 31,16.

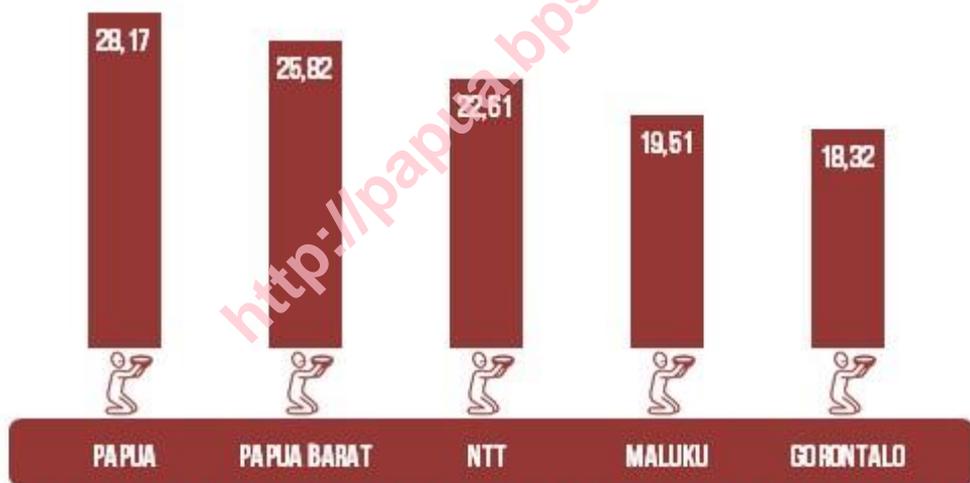
Akses terhadap sanitasi layak merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam menunjang kesehatan baik kesehatan penghuni rumah maupun kesehatan lingkungan disekitarnya. Untuk itu pada saat membangun perumahan haruslah memperhatikan sanitasi yang layak dengan membangun got atau selokan, sumur resapan dan tempat pembuangan akhir tinja yang memenuhi standar kesehatan seperti tangki septik (SPAL).

Kesehatan lingkungan dan pemukiman juga ditentukan oleh penggunaan air bersih. Tabel 2.12 menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air layak selama periode 2011-2014, yaitu 24,31 persen pada tahun 2011 naik menjadi 25,05 persen pada tahun 2012, kembali mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 25,37 persen, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2014 menjadi 21,66 persen.



# PAPUA MASIH MENJADI PROVINSI TERMISKIN DI INDONESIA

LIMA PROVINSI DENGAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TERTINGGI  
DI INDONESIA, MARET 2015



## 36,66%

RUMAH TANGGA MISKIN DI PAPUA  
TERDAPAT DI WILAYAH PERDESAAN

“WILAYAH TIMUR INDONESIA  
MASIH MENJADI WILAYAH TERMISKIN”

### **BAB III**

## **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah yang terjadi pada seluruh negara yang tidak pernah dapat diselesaikan secara tuntas, khususnya pada negara-negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang senantiasa dihadapkan dengan peliknya permasalahan kemiskinan ini. Maka tak heran bila permasalahan kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjalankan program-programnya.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

Metode yang digunakan yaitu dengan menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

### 3.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Keadaan kemiskinan di Provinsi Papua selama satu dekade terakhir menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, sejak Maret 2006 sampai Maret 2015 persentase penduduk miskin turun sebanyak 13,35 persen, walaupun secara Nasional Papua selalu menduduki posisi terakhir dalam jumlah dan persentase penduduk miskin.

**Gambar 3.1. Perkembangan Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2006-2015**



Penurunan persentase penduduk miskin terbesar terjadi pada periode Maret 2010-Maret 2011, yakni sebesar 4,81 persen dan penurunan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan baru terjadi lagi pada periode sept 2013-Maret 2014 yakni sebesar 2,25.

**Tabel 3.1. Persentase Penduduk Miskin menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2006-2015**

Tahun	Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>2006</b>	8,71	51,31	41,52
<b>2007</b>	7,97	50,47	40,78
<b>2008</b>	7,02	45,96	37,08
<b>2009</b>	6,10	46,81	37,53
<b>2010</b>	5,55	46,02	36,80
<b>Mar-11</b>	4,60	41,58	31,98
<b>Sep-11</b>	4,75	40,53	31,24
<b>Mar-12</b>	4,24	40,55	31,11
<b>Sep-12</b>	5,81	39,39	30,66
<b>Mar-13</b>	6,11	39,92	31,13
<b>Sep-13</b>	5,22	40,71	31,52
<b>Mar-14</b>	4,47	38,92	30,05
<b>Sep-14</b>	4,46	35,87	27,80
<b>Mar-15</b>	4,61	36,66	28,17

*Sumber: Diolah dari data Susenas*

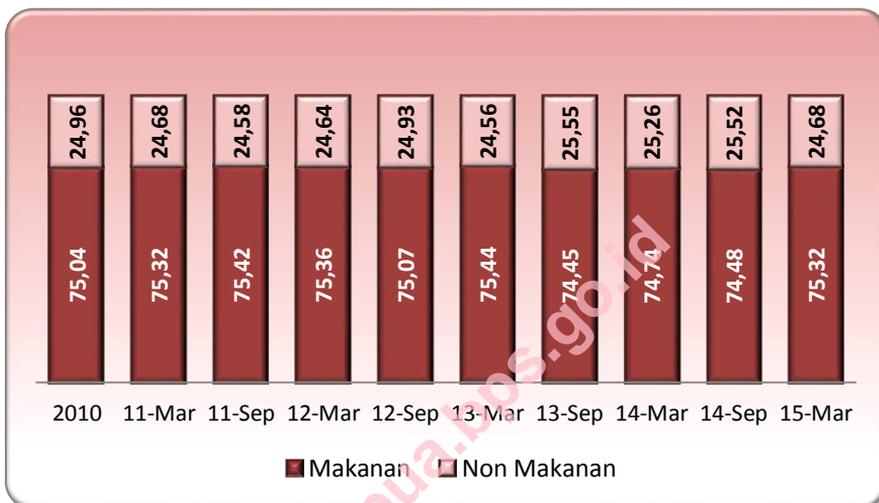
### **3.2. Perubahan Garis Kemiskinan**

Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk yang dikatakan miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Jadi besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah rata-rata pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Selama September 2014 – Maret 2015, Garis Kemiskinan naik sebesar 12,24 persen, yaitu dari Rp 358.204,- per kapita per bulan pada September 2014 menjadi Rp 402.031,- per kapita per bulan pada Maret 2015. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan N Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2015, sumbangan GKM terhadap GK cukup besar, yaitu 75,32 persen, sedangkan GKNM hanya sebesar 24,68 persen saja.

**Gambar 3.2. Persentase Garis Kemiskinan Menurut Jenis Komoditi, 2010-2015**



Sumber: BPS, Susenas 2015

**Tabel 3.2. Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2010-2015**

Tahun	Garis Kemiskinan (Per Kapita Per Bulan)		
	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	298.285	247.563	259.128
Mar-11	314.606	262.626	276.116
Sep-11	320.321	266.271	280.302
Mar-12	321.228	271.431	284.388
Sep-12	344.415	281.022	297.502
Mar-13	362.401	298.395	315.025
Sep-13	387.789	322.079	339.096
Mar-14	404.944	338.206	355.380
Sep-14	408.419	340.846	358.204
Mar-15	440,697	388,095	402,031

Sumber: BPS, Susenas 2015

### 3.3. Indeks Kedalaman dan Keparan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan tidak hanya dilihat dari berapa jumlah dan persentase penduduk miskinnya. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah seberapa dalam tingkat kemiskinan masyarakat terhadap garis kemiskinan dan seberapa besar kesenjangan pendapatan antara penduduk miskin tersebut. Kedua hal tersebut dapat dilihat melalui Indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ).

**Tabel 3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) Menurut Daerah, Maret 2010-Maret 2015**

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ )			Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ )		
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2007	1,25	13,67	10,84	0,29	4,94	3,88
2008	1,73	13,60	10,89	0,54	5,04	4,01
2009	0,80	11,51	9,07	0,17	3,81	2,98
2010	0,78	11,89	9,36	0,17	4,32	3,37
Mar-11	0,70	10,37	7,86	0,15	3,74	2,80
Sep-11	0,84	10,41	7,93	0,24	3,65	2,76
Mar-12	0,65	10,47	7,91	0,14	3,72	2,79
Sep-12	1,27	9,49	7,35	0,48	3,13	2,44
Mar-13	1,11	8,92	6,89	0,29	2,88	2,21
Sep-13	0,48	8,69	6,56	0,10	2,67	2,01
Mar-14	0,72	8,96	6,84	0,17	3,04	2,30
Sept-14	0,48	8,48	6,40	0,10	2,91	2,19
Mar-15	0,79	11,72	8,82	0,21	5,07	3,78

Sumber: BPS, Susenas 2015

Pada periode September 2014 – Maret 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Kearifan Kemiskinan ( $P_2$ ) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 6,40 menjadi 11,72. Sedangkan Indeks Kearifan Kemiskinan ( $P_2$ ) naik dari 2,19 menjadi 3,78 pada periode yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar. Hal ini perlu mendapat perhatian yang cukup serius dari berbagai pihak, walaupun secara persentase penduduk miskin tidak menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan namun jika dilihat lebih jauh kondisi penduduk miskin yang ada di Provinsi Papua semakin mengkhawatirkan, kenaikan nilai Indeks kedalaman menunjukkan rata-rata pendapatan penduduk miskin semakin jauh dari standar kehidupan layak yang sudah ditentukan.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Kearifan Kemiskinan ( $P_2$ ) di daerah perdesaan masih tetap lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Pada Maret 2015, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) untuk perkotaan hanya 0,79 sementara di daerah perdesaan mencapai 11,72. Begitu juga nilai Indeks Kearifan Kemiskinan ( $P_2$ ) untuk perkotaan hanya 0,21 sementara di daerah perdesaan mencapai 5,07. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih buruk dari daerah perkotaan.

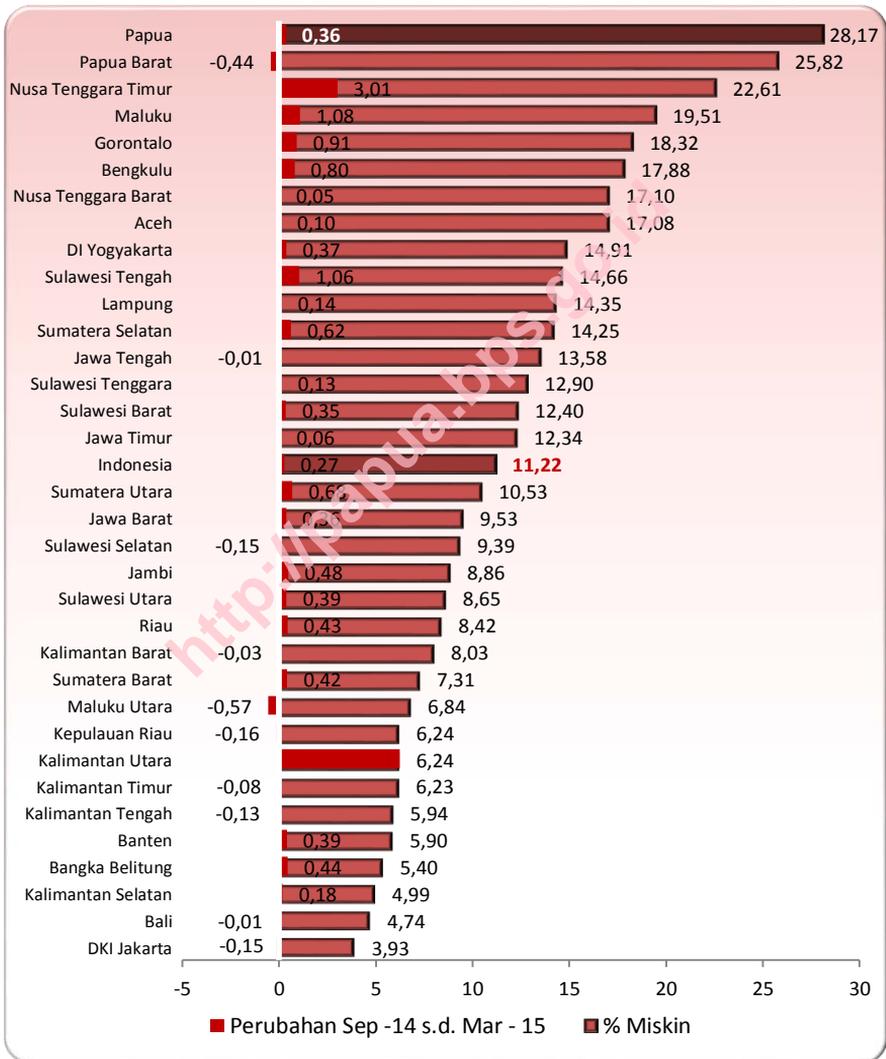
### 3.4. Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi

Gambar 2 menunjukkan persentase penduduk miskin menurut provinsi se-Indonesia berdasarkan data Susenas Maret 2015. Dari gambar tersebut tampak bahwa tiga provinsi di Kawasan Timur Indonesia yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terbesar yaitu berturut-turut 28,17 persen; 25,62 persen; dan 22,61 persen. Meskipun mengalami kenaikan persentase penduduk miskin namun kenaikan yang terjadi di Provinsi Papua bukan merupakan yang tertinggi, kenaikan persentase penduduk miskin tertinggi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencapai 3,01 persen.

Dari 34 provinsi, 10 provinsi diantaranya mengalami penurunan persentase penduduk miskin, dengan penurunan terbesar terjadi di Provinsi Maluku Utara, yang mencapai 0,57 persen.

Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin paling rendah (3,93 persen) disusul Provinsi Bali dan Kalimantan selatan dengan persentase penduduk miskin 4,74 persen dan 4,99 persen.

**Gambar 3.3. Persentase Penduduk Miskin Maret 2015 dan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Periode September 2014 – Maret 2015 menurut Provinsi**



Sumber: BPS, Diolah dari data SUSENAS Maret 2015



# INDEKS DEMOKRASI PAPUA BERADA PADA KATEGORI SEDANG

INDEKS DEMOKRASI DAN KOMPONEN PENYUSUNNYA  
DI PROVINSI PAPUA, 2014



INDEKS DEMOKRASI PAPUA MERUPAKAN YANG  
**TERENDAH** DI INDONESIA

## BAB IV Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi di provinsi. Yang dijadikan aspek demokrasi dalam penyusunan indeks ini adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), Hak-hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi sejumlah variabel dan indikator.

Indeks demokrasi Indonesia bertujuan untuk mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi tingkat provinsi di Indonesia. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi di provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang diteliti. Di samping itu, indeks perkembangan demokrasi di satu daerah juga dapat dibandingkan dengan daerah lainnya untuk memperoleh gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.

Mengukur perkembangan demokrasi bukanlah pekerjaan yang mudah karena luasnya pengertian demokrasi yang mencakup sejumlah besar objek. Oleh karena itu perlu dilakukan penentuan komponen-komponen demokrasi apa saja yang diukur. Setelah melewati beberapa proses, ditetapkan 3 aspek

dengan 11 variabel dan 28 indikator yang dianggap paling sesuai untuk diukur dalam penyusunan indeks ini.

Data IDI mengacu pada tingkat provinsi karena data yang dikumpulkan merupakan data tingkat provinsi, dan bukan pada tingkat nasional. Oleh karena itu kaya “Indonesia” dalam IDI mengacu pada rata-rata nilai provinsi di Indonesia. Tentu saja perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi berbeda dari perkembangandemokrasi pada tingkat nasional. IDI pada tingkat nasional harus menggunakan pemerintah pusat dan seluruh rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai sumber data, sedangkan IDI yang disusun pada tahap ini menggunakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang ada diprovinsi tersebut serta rakyat di provinsi yang bersangkutan sebagai sumber data.

#### **4.1. Arti penting dan Manfaat Indeks Demokrasi Indonesia**

Setelah lima belas tahun rakyat Indonesia kembali menggunakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik setelah tumbangny orde baru yang ditandai dengan turunnya presiden soeharto pada bulan Mei 1998, sangat menarik untuk mengetahui secara nyata perkembangan demokrasi di Indonesia baik pada tingkat provinsi maupun secara nasional. Selama ini perkembangan demokrasi di Indonesia hanya diukur secara kualitatif yakni berdasarkan perkiraan yang bersifat subjektif tanpa tolok ukur yang jelas.

Sudah saatnya perkembangan demokrasi yang sangat beragam di berbagai provinsi di Indonesia diukur secara kuantitatif dengan menggunakan angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi secara nyata. Pengukuran secara kuantitatif akan menghasilkan gambaran yang jelas dari tingkat perkembangan demokrasi. Di samping itu tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi akan menghasilkan perbandingan perkembangan demokrasi antar provinsi yang dapat mengungkapkan provinsi dengan tingkat perkembangan demokrasi yang paling baik dan yang paling buruk.

Gambaran yang diperoleh dari indeks demokrasi mempunyai berbagai manfaat. Pertama, secara akademis, dapat ditunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini memberikan data penting bagi studi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia karena tingkat perkembangan tersebut didasarkan atas data-data yang jelas dengan tolok ukur yang jelas pula. Data-data yang diperoleh dari indeks demokrasi dapat membantu para akademisi yang mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Adanya indeks demokrasi merupakan kemajuan dalam studi perkembangan demokrasi di Indonesia karena untuk pertama kalinya perkembangan demokrasi di berbagai provinsi di Indonesia dapat diketahui dengan pasti.

Manfaat kedua adalah bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi. Data-data yang disampaikan oleh indeks demokrasi mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.

Manfaat ketiga adalah bagi pemerintah dan masyarakat provinsi. Provinsi yang tingkat perkembangan demokrasinya kurang baik dapat menarik pelajaran dari data-data tersebut dengan memperhatikan indikator-indikator demokrasi yang mendapat nilai rendah. Pemerintah daerah dan masyarakat di provinsi bersangkutan secara bersama-sama dapat mengambil langkah-langkah tertentu yang dapat memperbaiki angka bagi indikator tersebut sehingga indeks bagi indikator itu bisa meningkat di masa yang akan datang. Data-data yang disampaikan oleh indeks demokrasi berguna bagi pemerintah daerah provinsi dan masyarakatnya untuk mengevaluasi diri sendiri dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di daerahnya masing-masing.

## 4.2. Aspek, Variabel, dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks demokrasi adalah suatu indeks komposit yang dibangun berdasarkan tiga aspek yang terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator. Tiga aspek komponen indeks demokrasi terdiri atas Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga-lembaga Demokrasi.

### A. Aspek Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)

- I. Kebebasan berkumpul dan berserikat, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - 1) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat;
  - 2) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.
- II. Kebebasan berpendapat, dengan indikator-indikator sebagai berikut::
  - 3) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat;
  - 4) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

- III. Kebebasan berkeyakinan, dengan indikator-indikator sebagai berikut::
- 5) Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya;
  - 6) Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya;
  - 7) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama.
- IV. Kebebasan dari diskriminasi, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
- 8) Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya;
  - 9) Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya;
  - 10) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

B. Aspek Hak-hak Politik (*Political Rights*)

V. Hak memilih dan dipilih, dengan indikator-indikator sebagai berikut::

- 11) Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- 12) Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- 13) Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
- 14) Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout);
- 15) Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi.

VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- 16) Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok;
- 17) Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

C. Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*)

VII. Pemilu yang bebas dan adil, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

18) Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu;

19) Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

VIII. Peran DPRD, dengan indikator-indikator sebagai berikut::

20) Persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD;

21) Persentase Kejadian perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap Kejadian total perda yang dihasilkan;

22) Rekomendasi DPRD kepada eksekutif.

IX. Peran Partai Politik, dengan indikator-indikator sebagai berikut::

23) Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu;

24) Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi.

X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, dengan indikator-indikator sebagai berikut::

25) Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif;

26) Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif.

XI. Peran Peradilan yang Independen, dengan indikator-indikator sebagai berikut::

27) Kejadian keputusan hakim yang kontroversial;

28) Kejadian penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

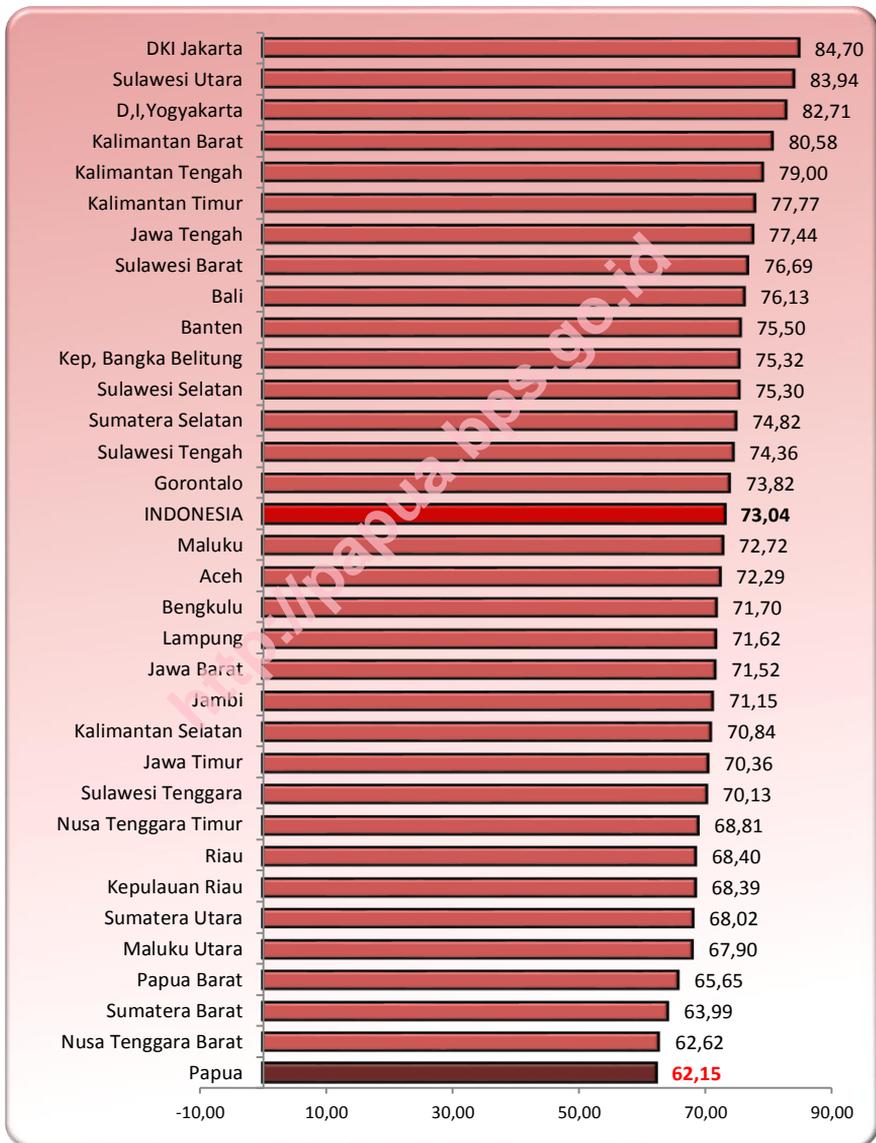
#### 4.3. Indeks Demokrasi Indonesia 33 Provinsi

Informasi lengkap mengenai Indeks Demokrasi Indonesia secara nasional dapat dilihat pada gambar 4.2. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa hanya ada 4 provinsi di Indonesia yang mempunyai indeks demokrasi dengan kategori tinggi (indeks > 80). Provinsi yang menduduki peringkat paling tinggi adalah DKI Jakarta (indeks 84,70), diikuti oleh Sulawesi Utara (indeks 83,94), D.I. Yogyakarta (indeks 82,71) dan Kalimantan Barat (indeks 80,58).

Secara umum nilai IDI untuk seluruh provinsi menunjukkan kinerja yang cukup baik, Bahkan Provinsi Papua yang memiliki Indeks Demokrasi Indonesia paling rendah (62,15) sudah berada pada kategori sedang. Namun masih dibutuhkan kerja keras dari para perencana bidang politik dan seluruh elemen demokrasi yang ada untuk bersama-sama meningkatkan perkembangan demokrasi di Tanah Papua.

Secara lebih teliti dapat dilihat bahwa rendahnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua sangat dipengaruhi oleh indeks aspek hak-hak politik (42,51) dan lembaga demokrasi (63,75) yang masih sangat rendah. Sementara aspek kebebasan sipil (85,69) tidak dapat memberikan perubahan besar terhadap kenaikan IDI karena rendahnya nilai kedua aspek yang lain.

**Gambar 4.1. Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi, 2014**



Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia

**Tabel 4.1. Indeks Aspek Pada Provinsi dengan IDI Tertinggi dan Terendah, 2014**

Provinsi	IDI	Indeks Aspek		
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga Demokrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DKI Jakarta (IDI Tertinggi)	84,70	91,72	73,94	92,97
Indonesia	63,17	66,48	62,63	73,04
Papua (IDI terendah)	62,15	85,69	42,51	63,75

*Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia, 2014*

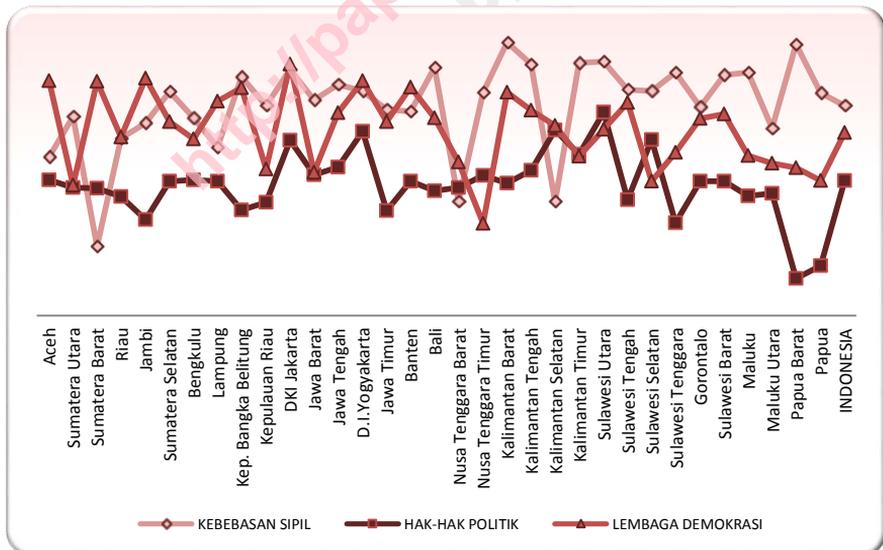
#### **4.4. Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Aspek**

Grafik pada gambar 4.1. secara eksplisit mengisyaratkan kecenderungan aspek Kebebasan Sipil yang memiliki indeks tertinggi dibandingkan dua aspek lainnya (Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi). Hal ini terjadi hampir secara merata di seluruh provinsi. Hanya pada tiga provinsi saja dimana indeks aspek Kebebasan Sipil berada di bawah indeks dua aspek yang lain, bahkan kualitas capaiannya buruk, yaitu di Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. Di Aceh, Riau, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Banten indeks aspek Kebebasan Sipil berada di bawah indeks aspek Lembaga Demokrasi namun di atas indeks aspek Hak-hak Politik. Indeks aspek Lembaga Demokrasi dengan kualitas capaian buruk hanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (53,12). Sedangkan indeks aspek Hak-hak

Politik dengan kualitas capaian buruk terjadi di Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Papua.

Secara keseluruhan dapat dikemukakan, penyebaran Indeks Demokrasi Indonesia menurut tiga aspek pada Gambar 4.2, semakin mempertegas bahwa sejauh ini Indonesia relatif berhasil dalam membangun kebebasan sipil, namun relatif tertinggal dalam hal memfungsikan lembaga demokrasi dan mengaktualisasi Hak-hak politik.

**Gambar 4.2. Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Aspek, 2014**

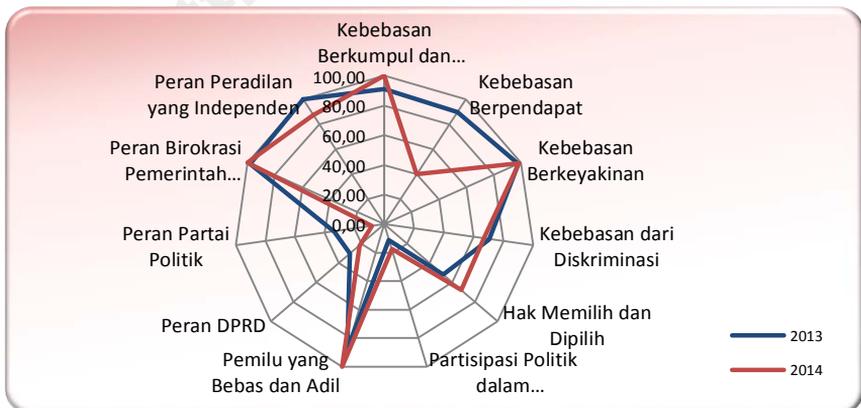


Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia, 2014

#### 4.5. Perkembangan Indeks Variabel IDI

Dari sisi variabel pembentuk IDI, terdapat enam variabel yang mengalami peningkatan skor dibandingkan dengan tahun 2013 yakni kebebasan berkumpul dan berserikat naik 8,75 poin, kebebasan berkeyakinan naik 0,38 poin, hak memilih dan dipilih yang naik cukup besar 15,95 poin, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan yang naik 6,33 poin, pemilu yang bebas dan adil naik 12,03 persen dan peran birokrasi pemerintah daerah naik 1,59 poin. Sementara itu, ada lima variabel yang mengalami penurunan indeks, yaitu kebebasan berpendapat yang turun cukup drastis hingga mencapai 50 poin, kebebasan dari diskriminasi turun 3,48 poin, peran DPRD turun 8,11 poin, peran partai politik turun sebesar 25,47 poin dan peran peradilan yang independen yang turun sebesar 12,50 poin.

**Gambar 4.3. Perkembangan Indeks Variable IDI Provinsi Papua, 2013-2014**



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://papua.bps.go.id>



**Badan Pusat Statistik Provinsi Papua**  
Gedung Peln Lantai 3 Jalan Argapura No. 15 Jayapura  
Telepon: (0967-534519, 533028 (Hunting) Fax: 536490  
Email: [bps9400@bps.go.id](mailto:bps9400@bps.go.id) Homepage: <http://papua.bps.go.id>